

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Efritadewi, A. (2020). *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: UMRAH press.
- Eko Cahyono, dkk. (2016). *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan
- Hartanto. (2019). *Memahami Hukum Pidana*. Yogyakarta: Lintang Pustaka Utama.
- La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya, M. A, dkk. (2024). *Teori Sosiologi*. Purbalingga: Eureka Media Aksara
- Manurung, A. H. (2022). *Sejahterakah Masyarakat Toba: PT Toba Pulp Lestari, Tbk Mau Kemana?* Jakarta: PT Adler Manurung Press.
- Prasetyo, T. (2020). *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media
- Rahmadi, T. (2017). *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rosyadi, I. (2022). *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media.
- Sembiring, J. (2018). *Dinamika Pengaturan Dan Permasalahan Tanah Ulayat*. Yogyakarta: STPN Press
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soetoto, E. O, dkk. (2021). *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media
- Tampubolon, M. (2023). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Global Eksekutif Teknologi

B. Perundang undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
- Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang cipta kerja
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Jurnal

- Ahmad, A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Usaha Yang Mengganti Uang Kembalian Dengan Permen Di Kota Balikpapan. *Jurnal Lex Suprema*.
- Alhakim, A. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia . *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.
- Ali, M. (2008). Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi atas Hukum) . *Jurnal Hukum*.
- Anggita. (2024). Penyelesaian Sengketa Konflik Kepemilikan Tanah Dengan Pendekatan Litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Savana: Indonesia Journal of Natural Resources and Environmental Law*.
- Arina Novizas Shebubakar, M. R. (2019). Hukum Tanah Adat/Ulayat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*.
- Askar Nur, F. Y. (2022). Proses dan Langkah Penelitian Antropologi: sebuah Literatur Review. *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial dan Budaya*.
- Aurellia, A. (2025). Gerakan Perlawanan Terhadap Sengketa Tanah Adat Melalui Politik Tubuh Perempuan. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*.
- Brahman, M. K, dkk. (2025). Hukum Sebagai Alat Kekuasaan Dalam Studi Kasus Kriminalisasi Petani Pada Konflik Agraria di Banyuwangi . *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan Politik*

- Christi Intan Palawa, dkk. (2025). Tinjauan Yuridis Sengketa Kawasan Hutan Produksi Tetap Antara Masyarakat Adat dan PT Toba Pulp Lestari: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Medan Nomor 1820/Pid.Sus Lh/2024/PT Mdn. *Lex Crimen Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*.
- Daniel Sinaga, dkk. (2024). Peran Nagori Dalam Penegakan dan Pelestarian Hukum Adat di Kabupaten Simalungun Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan . *Jurnal Fakultas Hukum*.
- Dika Raihan Batara, dkk. (2025). Langkah-Langkah Menentukan Populasi dan Sampel yang Tepat Dalam Penelitian. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia* .
- Djajaputra, G. (2022). Analisis Hak Atas Tanah Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Beserta Penyelesaiannya. *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Fauzi, I. (2023). Manajemen Konflik dan Cara Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi Sekolah . *Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin* .
- Harefa, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *UBELAJ*.
- Kepel, C. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Lex Administratum*.
- Krismantoro, D. (2022). Pengakuan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat: Analisis Hubungan Antara Hukum Nasional dan Hukum adat. *Jurnal Ilmiah Nasional*.
- Natalia H.M Rengkuhan, dkk. (2023). Efektifitas Kinerja Pemerintah Dalam Program Reaksi Respon Realif Daerah (R3D) di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Governance*.
- Nurdin, M. (2018). Akar Konflik Pertanahan di Indonesia. *Jurnal Hukum POSITUM* .
- Pangaribuan, D. H. (2025). Revitalisasi Hukum Adat Melalui Pendekatan Restorative Justice Terhadap Kriminalisasi Modern di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*.
- Rasyad, M. (2019). Pembuatan Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Notaris di kabupaten Agam. *Soumatera Law Review*.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*.
- Safitri, M. A. (2015). Resolusi Konflik Tenurial Kehutanan: Dari Legalistik ke Pendekatan Resolusi Konflik. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*
- Salam, S. (2023). Penguasaan Fisik Tanah Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah Ulayat di Pengadilan. *Jurnal Crepindo*.

- Sary, N. (2022). Tinjauan Ham Internasional Terhadap Perlindungan Hukum Masyarakat Adat (studi Kasus Masyarakat Adat Seko Sulawesi Selatan). *skripsi*.
- Setyowati, R. K. (2023). Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat. *Binamulia Hukum*
- Sinaga, F. A. (2021). Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia . *Edu Society: Jurnal Pendidikan Ilmu Social Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Siti Romdona, dkk. (2025). Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kuesioner. *Jisosespol: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*.
- Susanto, P. C. (2024). Konsep Penelitian Kuantitatif: populasi, Sampel dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka). *Jurnal Ilmu Multidisiplin*.
- Syahroni, M. I. (2022). Prosedur Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Al-Musthafa STIT Al-Aziziyah Lombok Barat*.
- Tambunan, S. A. (2025). Hak Ulayat Versus Hak Milik: Dinamika, Konflik, dan Resolusi. *Neoclassical Legal Review: Journal Of Law and Contemporary Issues*.

D. Internet

- Jimly Asshiddiqie, PENEGAKAN HUKUM, 2016, https://www.academia.edu/7565422/penegakan_hukum diakses pada tanggal 10 november 2025.
- Mardha Tillah. Perjuangan 9 Tahun Lahirnya Perda Kesepuhan Oleh Pemerintah Kabupaten Lebak: <https://rmibogor.id/perjuangan-9-tahun-lahirnya-perda-kasepuhan-oleh-pemerintah-kabupaten-lebak/> diakses tanggal 10 Juli 2026
- Nikson Sinaga, R. K. (2026, Februari 6). *Tata Ulang Konsesi PT Toba Pulp Lestari untuk Masyarakat Adat dan Pemulihan Ekologi*. kompas id: <https://www.kompas.id/artikel/penataan-ulang-konsesi-pt-toba-pulp-lestari-untuk-masyarakat-adat-dan-pemulihan-ekologi>
- Nurdiyansah Dalidjo, “Menenal Siapa Itu Masyarakat Adat”, Agustus 2021, <https://aman.or.id/news/read/1267> diakses pada tanggal 11 November 2025.
- Yusuf Abdhul Azis, <https://deepublishstore.com/blog/penelitian-terdahulu/> diakses pada tanggal 06 November 2025.